

DAFTAR PUSTAKA

- Aco, Hasanudin., “Nama Ruhut Sitompul Disinggung dalam Rapat, Anggota Komisi III DPR Tertawa,” *Tribunnews.com* 12 April 2017, *Online*, Internet, 17 Maret 2025, <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/04/12/nama-ruhut-sitompul-disinggung-dalam-rapat-anggota-komisi-iii-dpr-tertawa>
- Ahmad Naufal Dzulfaroh dan Sari Hardiyanto, “Partai Politik dan Sejarah Kelahirannya di Indonesia”, *Kompas.com* 9 Maret 2023, *Online*, 19 Januari 2025, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/09/091000165/partai-politik-dan-sejarah-kelahirannya-di-indonesia?form=MG0AV3>
- Argawati, Utami, “Sistem Proporsional Terbuka Bebaskan Pemilih Memilih Wakil Legislatif”, *mkri.id* 26 Januari 2023, *Online*, Internet, 20 Januari 2025, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18859&form=MG0AV3>
- Arsil, Fitra., 2018, “Problem Konstitusionalitas Undang-Undang MD3 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 15 No. 3, hlm. 465-488.
- Asshiddiqie, Jimly., 2006, “Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3 No. 4, hlm. 7.
- Asshiddiqie, Jimly., 2006, “Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 3 No. 4, Jakarta, hlm. 15.
- Asshiddiqie, Jimly., 2006, “Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3 No. 6, hlm. 12.
- Asshiddiqie, Jimly., 2006, *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*, *Jurnal Konstitusi* Vol. 3 No. 4.
- Asshiddiqie, Jimly., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 124.
- Asshiddiqie, Jimly., 2012, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 188-190.
- Asshiddiqie, Jimly., 2014, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 122.
- Asshiddiqie, Jimly., 2020, *Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 215.

- Asshiddiqie, Jimly., 2020, *Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 213.
- Basuki, Udiyo, 2020, "Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 2 No. 2, hlm. 93.
- Basuki, Udiyo, 2020, "Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi", *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 2 No. 2, hlm. 86.
- Basuki, Udiyo, 2020, "Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 2 No. 2, hlm. 91.
- Budiarjo, Miriam., 1992, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-14, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 60.
- Budiarjo, Miriam., 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 145
- Burke, Edmund., "Speech to the Electors of Bristol", *bristolideas.co.uk*, Online, Internet, https://www.bristolideas.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/LifetimeForJustice_Edmund-Burke.pdf
- Dameanti, Anggi Sihol, 2023, "Tinjauan Kritis Pergantian Antar Waktu dalam Dinamika Politik Indonesia: Perspektif Demokrasi", *Journal of Empirical Studies on Social Science* Vol. 3 No. 1, hlm. 16.
- Dian Erika Nugraheny, "Peran MA dalam Kasus PAW: Keluarkan Putusan hingga Fatwa untuk PDIP", *kompas.com* 15 Januari 2020, Online, Internet, 6 Mei 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/15/07464791/peran-ma-dalam-kasus-paw-keluarkan-putusan-hingga-fatwa-untuk-pdi-p?page=3>
- Erwanti, Marlinda Oktavia., "Perjalanan Kasus Fahri Vs PKS hingga MA Hapus Ganti Rugi Rp 30 M," *detikNews.com* 15 Desember 2020, Online, Internet, 28 Maret 2025, <https://news.detik.com/berita/d-5295719/perjalanan-kasus-fahri-vs-pks-hingga-ma-hapus-ganti-rugi-rp-30-m>
- Farida, Rida et al, 2013, "Mekanisme Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat," *Jurnal Cita Hukum*, Vol.1 Nomor 2, hal. 198.
- Farida, Rida et al, 2013, "Mekanisme Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat," *Jurnal Cita Hukum*, Vol.1 Nomor 2, hal. 209.

- H, Muhaimin., 2013, “Indonesia Now. Between Pancasila and Crisis of Democracy in Indonesia”, *International Journal for Public Management and Politics Development*, Vol. 1 No, hlm. 29.
- Handoyo, Hestu C., 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Atmajaya Yogyakarta,
- Harahap, Riza., “PKS Berhentikan Fahri Hamzah dari Wakil Ketua DPR RI, anggota PKS,” *antaranews.com* 4 April 2016, *Online*, Internet, 14 April 2025, <https://www.antaranews.com/berita/553396/pks-berhentikan-fahri-hamzah-dari-wakil-ketua-dpr-ri-anggota-pks>
- Hidayah, Yayuk, 2022, “Demokrasi Pancasila dalam Membangun Demokrasi Sehat”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 1 No. 2, hlm. 112.
- Huda, Ni'matul., 2011, “Recall Anggota DPR dan DPRD dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 23 No. 3, Yogyakarta, hlm. 142.
- Huda, Ni'matul., 2017, “Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi”, *Jurnal Penelitian Politik* Vol 16 No. 1, hlm. 104.
- Ibrahim, Johnny., 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, hlm. 249.
- Ihsanuddin, “Kisah Perlawanan Fahri Hamzah dari Sanksi Pemecatan PKS,” *Kompas.com* 5 April 2016, *Online*, Internet, 28 Maret 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2016/04/05/06244831/Kisah.Perlawanan.Fahri.Hamzah.dari.Sanksi.Pemecatan.PKS?page=all>
- Indirwan, 2021, “Analisis Pengaturan tentang Pemberhentian Antar Waktu (*Recall*) Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Kedaulatan Rakyat”, *Res Publica* Vol. 5 No. 2, hlm. 186.
- Indonesia Corruption Watch (ICW), “KPK Harus Segera Membongkar Kasus Suap Penggantian Antar Waktu yang Diduga Melibatkan Sekjen PDIP,” *icw.or.id* 24 Desember 2024, *Online*, Intenet, 29 Maret 2025, <https://www.icw.or.id/id/kpk-harus-segera-membongkar-kasus-suap-penggantian-antar-waktu-yang-diduga-melibatkan-sekjen-pdi-p>
- Indrayana, Denny., 2008, *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, hlm. 155-158.
- Isra, Saldi., 2018, *Pergeseran Legislasi dalam Sistem Presidensial*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 102.

Jon, "PAN Putuskan Nasib Djoko Edhi Selasa Sore," *detinNews.com* 21 Februari 2006, Online, Internet, 17 Maret 2025, <https://news.detik.com/berita/d-544091/pan-putusan-nasib-djoko-edhi-selasa-sore>

Kranenberg, R., & Sabaroedin, Tk. B., 1990, *Ilmu Negara Umum*, Cetakan Kesebelas, Jakarta: Pradnya Pramita, hlm. 8.

Kusuma, Ananda B., 2006, *Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 4 Tentang Recall*, Jakarta: MK RI, hlm. 156.

Laman resmi KBBI, <https://kbbi.web.id/wakil>

Laman resmi KPU, <https://www.kpu.go.id/page/read/1114/pemilu-2004>

Laman Resmi Wikisource, https://id.wikisource.org/wiki/Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia_Nomor_008/PUU-IV/2006

Lian, Nur et al., "Sistem PAW Anggota DPR RI Oleh Partai Politik Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat," *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1, hlm. 140

Lihat Pasal 239 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang merinci alasan-alasan pemberhentian antar waktu.

Lihat Pasal 75 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014: "Anggota DPR sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama" Pengucapan sumpah/janji inilah penanda dimulainya status keanggotaan.

Mada, Sukmajati dalam AL Mutaqqien, 2021, "Implikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR/DPRD Oleh partai Politik Terhadap Demokrasi", *Jurnal Sosial Humaniora*.

Marbun, BN., 2006, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 417.

MD, Mahfud., 2009, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajaawali Pers, hlm. 318.

MD, Mahfud., 2018, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 78.

"Melalui Voting, Anggota F-PAN Djoko Edhi Direcall dari DPR", *eramuslim.com* 23 Februari 2006, Online, Internet, 6 Mei 2025, <https://www.eramuslim.com/berita/nasional/melalui-voting-anggota-f-pan-djoko-edhi-direcall-dari-dpr/>

Mempertanyakan Hegemoni Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR di Tangan Partai Politik, *hukumonline.com* 22 Januari 2007, Online, Internet, 3 Februari 2025,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mempertanyakan-hegemoni-irecalli-anggota-dpr-di-tangan-partai-politik-hol16071/>

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 56.

Muhammad, Isnaeni., 1982 *MPR-DPR Sebagai Wahana Mewujudkan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Yayasan Idayu.

Muhammad, Isnaeni., 1982, *MPR-DPR Sebagai Wahana Mewujudkan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Yayasan Idayu.

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Noer, Deliar., 1985, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta: Rajawali, hlm. 207.

Noer, Deliar., 1989, *Mohammad Hatta Suatu Biografi Politik*, Jakarta: LP3ES, hlm. 305-306.

Nurhalim, Fitri, Icha Cahyaning., 2024, “Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1 No. 3, hlm. 6

Nurita, Dewi., “Soal PAW Nazarudin Kiemas ke Riezky Aprilia, Ini Kronologi KPU,” *tempo.co* 10 Januari 2020, *Online*, Internet, 16 April 2025, <https://www.tempo.co/politik/soal-paw-nazarudin-kiemas-ke-riezky-aprilia-ini-kronologi-kpu-665795>

Pamungkas, Sigit., 2009, *Perihal Pemilu*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gajahmada, hlm. 2.

Parapat, Ryan Salomo., “Demokrasi Kerakyatan Dalam Perspektif Mohammad Hatta,” *setneg.go.id* 15 April 2024, *Online*, Internet, 25 Maret 2025, https://www.setneg.go.id/baca/index/demokrasi_kerakyatan_dalam_perspektif_mohammad_hatta

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 239 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 mengatur teknis verifikasi calon pengganti antar waktu oleh KPU.

Prakarsa Tri, Hadi., 2011, “Fungsi Partai Politik dalam Mekanisme Pemberhentian Antar waktu Keanggotaan Legislatif di Indonesia”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, hlm. 2.

Priyambodo RH, ”MK Tolak Permohonan Djoko Edhi”, *antaranews.com* 28 September 2006, *Online*, Internet, 6 Mei 2025, <https://www.antaranews.com/berita/43276/mk-tolak-permohonan-djoko-edhi>

Puspita, Melynda Dwi., “Masih Berlaku Untuk Pemilu 2024, Apa Maksud Ambang Batas Parlemen 4 Persen?”, *tempo.co* 1 Maret 2024, *Online*, Internet, 14 April 2025, <https://www.tempo.co/hukum/masih-berlaku-untuk-pemilu-2024-apa-maksud-ambang-batas-parlemen-4-persen--81846>

Putra, Aji YK, “Meninggal Sebelum Pencoblosan, Adik Ipar Megawati Raih Suara Terbanyak di Sumsel,” *Kompas.com* 15 Mei 2019, *Online*, Internet, 16 April 2025, <https://regional.kompas.com/read/2019/05/15/05060021/mentinggal-sebelum-pencoblosan-adik-ipar-megawati-raih-suara-terbanyak-di>

Putusan MA No. 123 PK/Pdt/2020

Putusan MA No. 1876 K/Pdt/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi 22-21/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi 39/PUU/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 008/ PUU-IV/2008 tentang Pengujian UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 16 ayat (3) UU Partai Politik.

Rachmat, Mei Amelia., “KPK Usut PAW Maria Lestari, PDIP Tuding ‘Lembaga Gosip’,” *detikNews.com* 11 Januari 2025, *Online*, Internet, 28 Maret 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7727951/kpk-usut-paw-maria-lestari-pdip-tuding-lembaga-gosip>

Ramadhan, Ardito., “Begini Kronologi OTT KPK yang Menjaring Komisioner KPU Wahyu Setiawan,” *Kompas.com* 9 Januari 2020, *Online*, Internet, 21 April 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/09/20372611/begini-kronologi-ott-kpk-yang-menjaring-komisioner-kpu-wahyu-setiawan?page=all>

- S, Budiyo., 2015, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 75.
- S. Sulardi., 2013, *Sistem dan Prosedur Penggantian Antar Waktu Anggota DPR*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 50-55.
- Salang, Sebastian., 2006, "Parlemen: Antara Kepentingan Politik VS Aspirasi Rakyat", *Jurnal Konstitusi*, Volume 3 Nomor 4, hlm.100.
- Samuel Bay, Jon., 2021, "Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 3 No. 2, hlm. 147.
- Siagian S., 2014, *Pengawasan DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 30-35.
- Soehino, 2006, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm 45-50.
- Strong, C.F., 1960, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, Sidgwick & Jackson Limited, London, hlm.288.
- Sulisworo, D., Wahyuningsih, T., & Arif, D. B, 2012, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional: Bahan Ajar Demokrasi. Yogyakarta: UAD, hlm. 24.
- Supriyadi, Eko., "Ruhut Resmi Ajukan Surat Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR" *News.republika.co.id* 10 November 2016, *Online*, Internet, 28 Maret 2025, <https://news.republika.co.id/berita/ogfag2330/ruhut-resmi-ajukan-surat-pengunduran-diri-sebagai-anggota-dpr>
- Tashandra, Nabila., "Keputusan Dewan Kehormatan Demokrat: Ruhut Sitompul Dipecat dari Partai" *Kompas.com* 27 Oktober 2016, *Online*, Internet, 14 April 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2016/10/27/16390821/keputusan.dewan.kehormatan.demokrat.ruhut.sitompul.dipecat.dari.partai?page=all>.
- Tri Haryani, Anik., Iswati, Retno., & Wijaya, Candra M., 2022, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 8 No. 1, hlm 13.
- UU No. 17 Tahun 2014, Pasal 239 ayat (1) huruf b.
- UU Nomor 17 Tahun 2014
- Yuantisya, Mutia., "Sidang Suap Hasto Kristiyanto, Penuntut Umum Hadirkan 3 Saksi," *tempo.co* 17 April 2025, *Online*, Internet, 21 April 2025, <https://www.tempo.co/hukum/sidang-suap-hasto-kristiyanto-penuntut-umum-hadirkan-3-saksi-1232305>